

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

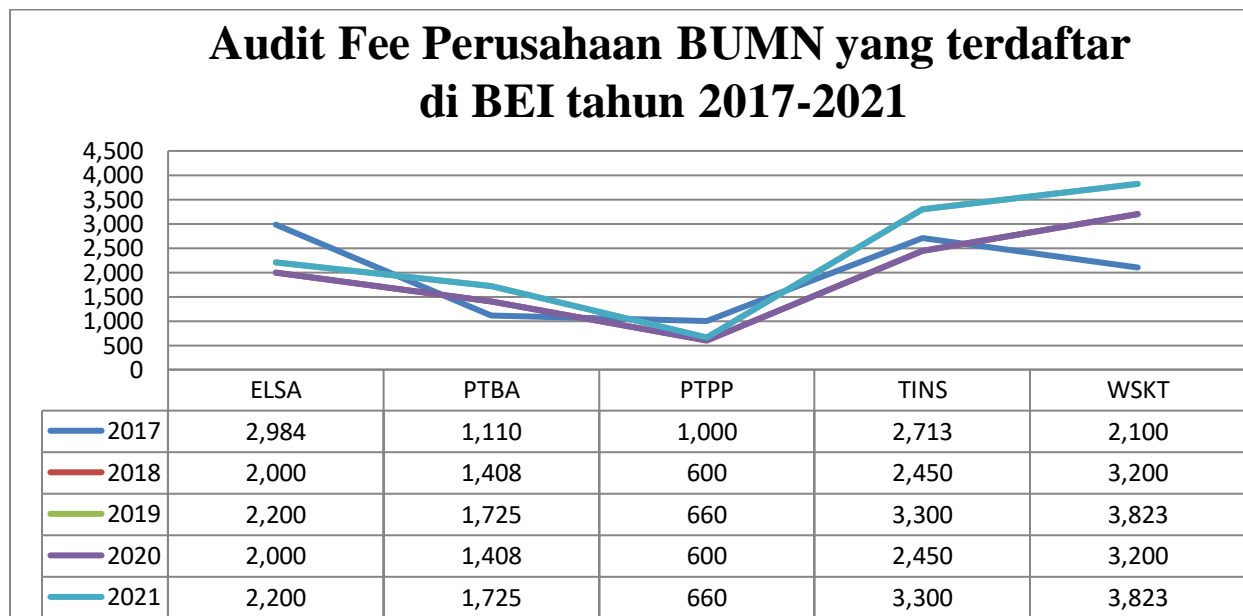
Laporan keuangan menjadi salah satu sarana penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi terkait dengan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan sangat diperlukan para pengguna laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan menjadi hal yang krusial sehingga dibutuhkan keterlibatan peran dari pihak independen dari luar perusahaan dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP). Keandalan laporan keuangan diwujudkan dalam opini audit yang dikeluarkan oleh auditor (DeFond & Zhang, 2014). Opini audit merupakan rangkaian akhir dari suatu perikatan audit yang melibatkan kantor akuntan publik dengan Perusahaan.

Selama dua tahun terakhir, perhatian publik Indonesia terfokus pada tata kelola perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontroversi hasil audit laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (CNN Indonesia, 2019), kemudian isu kegagalan PT Jiwasraya membayar klaim asuransi pada 2019 menjadi sebuah pertanyaan akan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN bahwa biaya audit yang sangat mahal itu menjadi sia-sia.. Tuntutan akan audit yang berkualitas menjadi sorotan kepada KAP. Selain itu, proses bisnis dan standar akuntansi keuangan menjadi semakin kompleks, yang membutuhkan peningkatan kualitas layanan audit yang diberikan oleh kantor akuntan.(DeFond & Zhang, 2014). Peningkatan kualitas audit akan mendorong peningkatan fee audit mengingat fee audit menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (Sinaga & Rachmawati, 2018).

Audit fee adalah besarnya bayaran yang diberikan oleh klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikan yaitu berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan

(Iskak, 1999). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 mengenai penentuan besarnya fee audit. Panduan dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan fee audit berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang dimaterai, sebagai bukti adanya kesepakatan fee audit anantara kedua belah pihak tersebut (Sinaga & Rachmawati, 2018).

Berikut merupakan besaran dari fee audit yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan BUMN selama tahun 2017-2021 yang diprosikan dengan biaya profesional :



Sumber : www.idx.co.id

Gambar 1.1 Besaran fee audit perusahaan BUMN

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa besaran fee audit dari perusahaan BUMN berbeda. Tren yang dialami oleh besaran fee audit yang dikeluarkan oleh perusahaan BUMN

cenderung fluktuatif. Hal ini didasarkan pada banyaknya faktor yang mampu mempengaruhi besaran dari fee audit mulai dari faktor internal perusahaan, hingga faktor eksternal perusahaan. Dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari fee audit ada pada SKT pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 3.823.000.000. Sementara nilai terendah untuk fee audit ada pada PTPP pada tahun 2018-2021 sebesar Rp. 660.000.000.

Audit fee dapat menjadi ukuran yang valid untuk memprediksi penipuan, penyajian kembali, dan surat-surat komentar SEC, yang mewakili efektifitas pengawasan eksternal oleh auditor (Hegde & Zhou, 2019). Penentuan fee audit umumnya didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu proses audit, jasa, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit (Fierda et al., 2015). Auditor akan bersikap profesional dan sesuai dengan kode etik akuntansi jika prosedur yang direncanakan audit, sumber daya manusia yang berkualitas, dan program pelaksanaan audit yang didukung oleh berbagai faktor yang tidak lolos dari dana tersebut.

Besarnya audit fee masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah *income smoothing* (perataan laba). Perataan laba umumnya didefinisikan sebagai pengurangan fluktuasi yang disengaja dalam seri pendapatan dari waktu ke waktu. Literatur sebelumnya dan bukti yang ada menunjukkan dua pandangan berbeda mengenai apakah perataan laba berbahaya atau bermanfaat bagi pelaku pasar dan/atau pemangku kepentingan perusahaan. "Informasi" Pandangan berpendapat bahwa manajer menggunakan perataan laba untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka tentang kinerja masa depan perusahaan, yang dapat meningkatkan penilaian perusahaan dan keinformatifan laba (Chang et al., 2021).

Ada argumen yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif atau negatif antara perataan laba dan biaya audit, artinya bahwa perusahaan dengan tingkat perataan laba yang cenderung lebih tinggi akan membayar auditor eksternalnya dengan biaya yang lebih besar pula. Di satu sisi, manajer memiliki insentif untuk memperlancar volatilitas pendapatan dan mengirim sinyal risiko bisnis yang lebih rendah dan kinerja masa depan yang cerah kepada pemangku kepentingan untuk persyaratan perdagangan yang lebih baik. Sejauh risiko bisnis perusahaan (yaitu, klien) merupakan penentu biaya audit, perataan laba dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga auditor dan menyebabkan biaya audit yang lebih rendah (Hurtt et al., 2013).

Di sisi lain, perataan laba dapat digunakan oleh manajer untuk secara sengaja menyembunyikan informasi tentang kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya, yang dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam manajemen laba oportunistik dan pelaporan keuangan yang salah. Sebagai tanggapan, auditor dapat membebankan biaya audit yang lebih tinggi untuk menutupi risiko litigasi tinggi yang timbul dari penggunaan perataan laba sebagai perilaku pelaporan oportunistik (Chang et al., 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *Audit fee* adalah *audit report lag*. *Audit report lag* mengacu pada periode akhir akuntansi dengan tanggal pelaporan auditor eksternal. *audit report lag* berhubungan positif dengan kompleksitas serta risiko litigasi. Artinya semakin kompleks suatu perusahaan maka proses audit akan semakin rumit pula. Auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam menguji dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan sehingga menyebabkan penetapan audit fee menjadi lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada biaya audit eksternal. Ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau terlibat dalam tindakan ilegal selama setahun, jumlah bukti yang dikumpulkan auditor eksternal harus meningkat, yang pada

berbalik mengarah ke peningkatan biaya audit yang lebih ketika pekerjaan audit diperlukan oleh perusahaan tersebut (Harjoto et al., 2015).

Selama penyelesaian pekerjaan audit laporan keuangan, auditor membuat dan mengumpulkan jadwal untuk mencatat hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang dilaksanakan, serta membuat jurnal penyesuaian yang akan diusulkan kepada klien jika dalam pekerjaan terjadi perbedaan antara jurnal atau kertas kerja yang dibuat klien dengan dokumen transaksi. Keterlambatan laporan audit (ARL) dan biaya audit telah dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya sebagai proxy untuk risiko audit dan upaya audit (Bailey et al., 2018).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *Audit fee* adalah gender diversity komite audit. Keterwakilan perempuan di komite audit telah lama menjadi subjek penelitian dan tetap menjadi isu penting bagi akademisi, profesional, dan pembuat kebijakan. Perempuan diyakini memiliki nilai dan kepentingan yang membuat mereka lebih peka terhadap perilaku tidak etis dibandingkan laki-laki. Kehadiran komite audit perempuan dapat menyebabkan tuntutan kualitas audit yang lebih tinggi dan, juga, biaya audit yang lebih tinggi (Bhuiyan et al., 2020).

Dalam kasus ini, Lai dkk. (2017) menemukan bahwa komite audit yang beragam gender lebih cenderung menunjuk auditor spesialis yang lebih memperhatikan detail, menunjukkan independensi untuk menghadapi manajer, dan memberikan upaya audit yang lebih besar untuk memproses informasi secara objektif, yang pada gilirannya menghasilkan biaya audit yang lebih tinggi. Selain itu, karena literatur sebelumnya telah menunjukkan bahwa biaya audit lebih tinggi untuk perusahaan dengan komite audit wanita karena direktur wanita menuntut audit yang lebih baik, artinya ada efek sisi penawaran dari auditor yang mengenakan biaya audit yang lebih tinggi untuk kehadiran komite audit perempuan yang tercemar (Airlangga, 2020).

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mampu mempengaruhi *Audit fee* adalah *audit firm ranking*. Perusahaan go public cenderung akan memilih KAP dengan kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pengguna laporan keuangan. KAP yang lebih besar dianggap lebih mampu menjalankan tugas audit yang lebih berat dan mampu mempertahankan independensinya (Cristansy & Ardiati, 2018).

Audit firm ranking dalam penelitian dilihat dari apakah KAP tersebut termasuk dalam KAP “Big Four” atau tidak. KAP Big Four dipercaya memiliki reputasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan KAP tersebut memiliki jam terbang yang lebih tinggi, jumlah klien yang lebih banyak, serta efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik non-Big Four. KAP Big Four dipandang lebih baik dibandingkan KAP non-Big Four dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Dengan begitu, auditor dari KAP Big Four cenderung akan menetapkan fee audit yang lebih tinggi (Zielma & Widyawati, 2019).

Penelitian mengenai determinan dari *Audit fee* telah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh (Xiang & Song, 2021), (Chang et al., 2021), (Bhuiyan et al., 2020), (Cho et al., 2021), (MohammadRezaei et al., 2018), dan (Oradi, 2021). Topik penelitian ini menarik untuk diteliti untuk membuktikan kembali hasil dari penelitian terdahulu. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan memilih perusahaan BUMN sebagai objek penelitian karena BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional dan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga sangat baik untuk diteliti apa saja determinan dari *audit fee* pada perusahaan BUMN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *income smoothing* berpengaruh positif terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN?
2. Apakah *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN?
3. Apakah gender diversity komite audit berpengaruh positif terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN?
4. Apakah *audit firm ranking* berpengaruh positif terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *income smoothing* terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *audit report lag* terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif gender diversity komite audit terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *audit firm ranking* terhadap *Audit fee* pada perusahaan BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang determinan dari audit fee dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi pada khususnya pada akuntansi.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan Memberikan manfaat terkait langkah apa saja yang akan dilakukan pihak praktisiterkait dengan faktor-faktor dan determinan yang mampu mempengaruhi *Audit fee*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan rencana penelitian ini, penulis menguraikan keseluruhan isi skripsi ini secara ringkas yang terdiri dari beberapa bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan literature, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan tehnik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai hipotesis yang telah dilakukan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan, saran dan keterbatasan peneliti dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian serta bagian akhir akan dimuat daftar pustaka